

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA SINJAI**
(Studi Terhadap Hambatan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa)



**Skripsi diajukan untuk memenuhi kewajiban dan syarat guna memperoleh
gelar Sarjana untuk program S1 dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Peradilan Agama**

Oleh

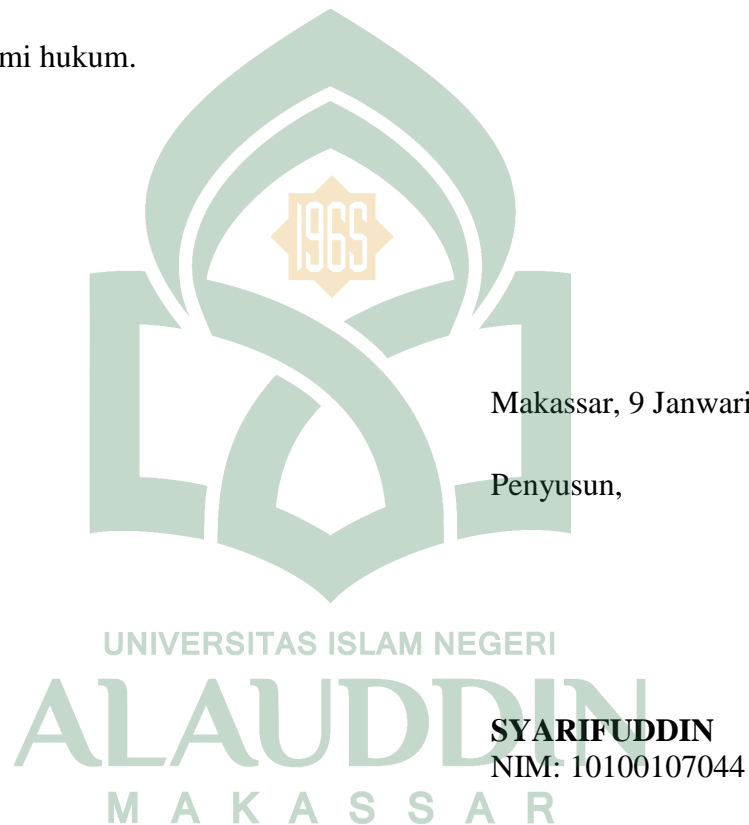
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SYARIFUDDIN
NIM : 10100107044

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Syarifuddin Nim: 10100107044 Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kabupaten Sinjai Studi Terhadap Hambatan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, 9 Januari, 2012



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.H. Ali Parman. MA
NIP. 19570414 189603 1 003

ABD. Halim Talli S.Ag. M.ag.
NIP. 19711020 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Sepatutnyalah sebagai penulis mencurahkan segala rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut andil dalam memberikan support sehingga menjadi nilai tersendiri atas rampungnya karya ini, terkhusus kepada;

1. Yang mulia kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang karena segala curahan kasih sayang serta segenap perhatiannya kepada penulis sejak dari kandungan hingga waktu yang tak tentu, penulis tak sanggup tuk membalasnya sampai kapanpun.

2. Ayahanda Prof. DR.H. Ali Parman, MA., dan Ayahanda Abd. Halim Talli S.Ag, M.Ag, masing-masing selaku pembimbing penulis, yang senantiasa menyisihkan sebagian waktunya untuk efektifitas penulisan skripsi tersebut.

3. Ayahanda Rektor UIN Alauddin Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang dengan kebijaksanaannyalah, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akademisi.

4. Ayahanda Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas dalam hal penyusunan skripsi ini.

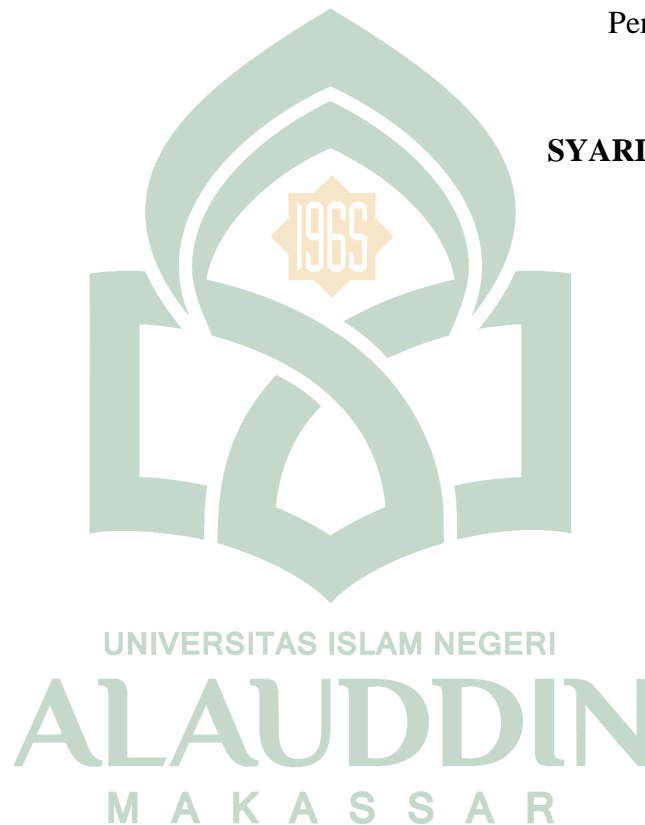
5. Serta adinda tercinta yang senantiasa memberikan apresiasi dan sumbangan pemikirannya.

6. Rekan-rekan seperjuangan, Jurusan Peradilan Agama 07, Khususnya Malik, Iful, Suaip, Yahya, yang telah banyak membantu, serta rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang kepadanya penulis mengucapkan banyak terima kasih serta luapan rasa maaf yang tak terkira.

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepadanya penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.

Penulis,

SYARIFUDDIN



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERESETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 4 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Hipotesis | 5 |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Tujuan dan Kegunaan | 13 |
| BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SINJAI.. | 14 |
| A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sinjai | 14 |
| B. Susunan Organisasi Peradilan Agama Sinjai | 17 |
| C. Kompetensi Pengadilan Agama Sinjai..... | 21 |
| BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERCERAIAN | 30 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian | 30 |
| B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai... .. | 36 |
| C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai..... | 40 |
| BAB IV : ANALISIS PERANAN HAKIM DAN HAMBATANNYA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA SINJAI | 46 |
| A. Sistem Pengadilan Agama Sinjai Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian | 46 |
| B. Hambatan Pengadilan Agama Sinjai Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Dalam Administerasi Perkara dan Persidangannya | 58 |
| C. Solusi Yang di Capai oleh Pengadilan Agama Sinjai Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Perceraian | 64 |
| Bab V : PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran-saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai(Studi Terhadap Hambatan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa)**” yang disusun oleh saudara **Syarifuddin**, Nim: 10100107044, mahasiswa Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 6 Desember 2011 M, bertepatan dengan 10 Muharram 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Januari 2012 M

15 Safar 1433 H

DEWAN PENGUJI :

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | :Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. | (.....) |
| Sekretaris | :Dr. Muhammad Sabri, M.Ag | (.....) |
| Munaqisy I | : Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag. | (.....) |
| Munaqisy II | :Andi Intan Cahyani, S.Ag.,M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Prof Dr. H. Ali Parman, M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing II | : Abd. Halim Talli, S.Ag.,M.Ag. | (.....) |

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

ABSTRAK

Nama : Syarifuddin
Nim : 10100107044
Judul : **Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai
(Studi Terhadap Hambatan Hakim Dalam Menyelesaikan
Sengketa)**

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai (Studi terhadap hambatan Hakim dalam menyelesaikan sengketa), dan ingin mengetahui sejauh mana hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

Dalam pembahasan permasalahan tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan penelitian pendekatan yaitu, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis, penulis juga menggunakan metode pengumpulan data, seperti *Library Research* dan *Field Research*, dan metode pengumpulan data yaitu, metode induktif dan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil mengenai penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai dan dapat mengetahui sejauh mana hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa baik dalam administrasi maupun dalam persidangan, dalam tahap administrasi yaitu, Memasukkan perkara pada meja pertama kemudian membuatkan SKUM dan pembayaran biaya pada kasir, selanjutnya pada meja kedua pendaftaran perkara, penetapan majelis Hakim, penetapan hari sidang oleh majelis Hakim dan panggilan para pihak melalui juru sita. Kemudian tahap persidangan. Dalam persidangan Hakim berusaha untuk mendamaikan, apabila kedua belah pihak tidak berdamai barulah Hakim melanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah, dan putusan. Namun dalam tahap administrasi dan tahap persidangan Hakim mengalami hambatan seperti hambatan administrasi dimana pemanggilan dan hari sidang tidak dipenuhi dengan baik oleh para pihak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai. Selanjutnya Tahap persidangan pada tahap ini dimana Hakim sulit menentukan atas hak kuasa asuh anak di dalam perkara perceraian karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dalam undang-undang membahas tentang itu.

Adapun implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan perbaikan kekurangan dalam membahas tentang hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam setiap saat menghendaki adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan secara pribadi maupun hubungan secara kelompok. Manusia dalam hubungan itu senantiasa menghadapi berbagai persoalan yang akibatnya membawa kepada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menghadapi hal seperti itu maka diperlakukan adanya suatu tata aturan yang lazim dikenal dengan hukum atau undang-undang.

Terpenuhinya suatu kepastian hukum dalam masyarakat diperlakukan adanya suatu lembaga yang dapat menerima, memeriksa dan menyelesaikan segala persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga tersebut dikenal dengan Pengadilan.

Pengadilan merupakan tempat proses penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan orang yang melakukan proses dan menetapkan hukum atau suatu perkara disebut dengan hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim untuk menyelesaikan gugat menggugat, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas pengadilan.¹

¹Depertemen Agama RI, *Hukuma Acara Menurut Syariah Islam* (t.t.p: Poyek Pembinaan Badan Pengadilan Agama, 1985), h. 23-24

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan kehakiman dalam lingkungan Pengadilan Agama.² Bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang suda menjadi wewenang Pengadilan Agama yang meliputi nikah, cerai talaq, dan rujuk.

Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas, senantiasa menghadapi hambatan-hambatan, khususnya dalam masala perceraian, baik perceraian karena pengaruh budaya setempat maupun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Prosedur penyelesaian perkara perceraian dikenal beberapa istilah yang sangat terkait dengan alasan-alasan diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Adapun istilah-istilah penulis maksudkan adalah: *Thalaq khul'i*, *thalaq syiqaq talaq li'an* dan lain sebagainya. Talak khul'I adalah, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena suami telah melanggar sighat tali talak, sedangkan talaq Syiqaq adalah, cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak, dan talaq Li'an adalah, cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.

Dan proses pemeriksaan perkara perceraian selalu dilakukan oleh hakim dengan bentuk sidang tertutup untuk umum. Hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana hukum harus senantiasa memberikan nasehat-nasehat kedua belah pihak

²Direktorat pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, *Mimber Hukum*, No. 2 Tahun, 1991 (Jakarta: AL-Hikmah, 1991),h. 16

untuk melakukan perdamaian, baik menasehati secara pribadi maupun dengan cara majelis.

Namun demikian hakim dalam menangani perkara perceraian terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara perceraian, karena hakim dalam beracara di Pengadilan Agama telah diatur oleh undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang aturan pokok perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan sistem beracara di Pengadilan Agama yang sementara perkara yang diajukan kepadanya terkadang melenceng dari aturan tersebut diatas.

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai melalui dua proses:

1. Proses administrasi

Namun dalam proses administrasi Pengadilan Agama Sinjai mengalami problem namun tidak terlalu merasakan dampak kesulitan ataupun hambatan dalam menangani administrasi perkara didalam interen Pengadilan Agama Sinjai. Akan tetapi ada beberapa hal yang oleh Pengadilan Agama Sinjai dianggap suatu hambatan itu diakibatkan oleh para pihak yang berperkara itu sendiri, yaitu dalam hal ini adanya keterlambatan dalam proses administrasi perkara dan itu diakibatkan oleh pihak yang berperkara, dimana adanya keterlambatan para pihak untuk menghadiri proses persidangan, yang mana ketika pihak Pengadilan Agama Sinjai melakukan penetapan hari sidang dan dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi terkadang pihak yang

berperkara tidak mematuhi panggilan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai, sehingga proses penanganan perkara tersebut lambat terselesaikan. Dan problem yang lain adalah biaya perkara oleh para pihak yang berperkara dianggap mahal.

2. Persidangan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Sinjai dalam menangani perkara sengketa perceraian hakim mengalami hambatan yaitu, hak asuh anak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai sulit memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya secara baku. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah: Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?

³Siti Jannatul Hilmi Dkk,Pengadilan Agama Sinjai,(Sinjai, Tanggal 20 juli 2011)

Adapun sup masalah dari pokok permasalahan diatas adalah:

1. Sejaumana hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Hipotesis

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka menjadi jawaban sementara dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada dua tahap yaitu:

1. Administrasi

Dalam proses administrasi atau penerimaan perkara di Pengadilan Agama Sinjai melalui beberapa meja:

a. Meja pertama

- 1) Menerima perkara gugatan dan permohonan.
- 2) Menentukan atau menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 3) Menyerahkan surat gugatan dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara kepada pemegang kas Pengadilan Agama Sinjai kemudian membukukan uang panjar tersebut pada jurnal keuangan perkara, mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas

bantu yang dibuat dua rangkap, lembar satu disimpan kasir dan lembar dua diserahkan pada panitera.

- 4) Panitera atau staf panitera yang ditunjuk surat keputusan ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku induk yang bersangkutan.

b. Meja Kedua

- 1) Mendaftar perkara sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
- 2) Berkas perkara dilengkapi dengan formulir penetapan mejelis Hakim yang disampaikan pada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Peradilan Agama Sinjai melalui panitera.
- 3) Perkara yang sudah ditetapkan mejelis Hakim, segera diserahkan kepada mejelis Hakim yang ditunjuk.
- 4) Penetapan hari sidang oleh majelis Hakim.
- 5) Pemanggilan para pihak oleh juru sita.

c. Meja Ketiga

Tugas meja ketiga pada dasarnya setelah perkara tersebut oleh majelis hakim memutus perkara.

2. Tahap persidangan

1. Pemanggilan para pihak yang berseengketa.
2. Perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
4. Replik penggugat.

5. Duplik tergugat.
 6. Pembuktian para pihak yang berperkara.
 7. Kesimpulan.
 8. Musyawarah Hakim.
 9. Putusan majelis hakim.
1. Hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karenanya Hakim sebagai pelaksana tugas dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, maka haruslah ia senantiasa berlaku adil dan benar serta memandang sama di mata hukum. Hakim dalam menganban tugas sebagaimana yang disebut di atas, senantiasa mengalami hambatan-hambatan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, Salah satu hambatan Hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah hak asuh anak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai sulit memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi Hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu.
 2. Upaya yang dilakukan oeh Hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadila Agama Sinjai adalah, Hakim harus menguasai tehnik-tehnik persidangan dan menguasai masalah hukum khususnya hukum perdata, dan begitu pulah Hakim Pengadilan Agama Sinjai senantiasa mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai masalah hukum bekerjasama pada pihak terkait sehingga

nantinya paham betul bahwa betapa pentingnya hukum itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang adil, beradap, aman, damai, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, sampai pada berbangsa dan bernegara.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh kesatuan arti dan kejelasan dari judul seperti ini, maka penulis akan memberikan beberapa istilah penting yang dipergunakan dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Kata penyelesaian atau memutuskan (menyebabkan) putus: jadi kata penyelesaian dimaksud penulis adalah bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara dan pengadministrasian, proses persidangan hingga pada putusan majelis (eksekusi) sehingga pada akhirnya perkara tersebut bisa ditangani dan terselesaikan dengan baik oleh Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan yang baik dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan hukum yang berlaku. Dan penyelesaian bisa juga disebut dengan proses, perbuatan, cara menyelesaikan (di berbagai-bagai seperti pembebasan, pemecahan).⁴
2. Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahkan suatu objek tertentu hal ini terjadi karena kesalahpahaman

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Edisi 3, cet 1 Balai pustaka 2001), h. 181

atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

3. Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara Suami Istri), perpecahan.⁵
4. Pengadilan adalah tempat proses penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang bersengketa.
5. Pengadilan Agama Sinjai adalah suatu lembaga kehakiman yang daerah hukumnya berada diwilayah kabupaten Sinjai yang menangani perkara orang yang beragama Islam.
6. Hambatan adalah berasal dari kata “hambat” yang mendapat akhiran “an” yang artinya halangan atau rintangan. Adapun hambatan yang dimaksud oleh penulis adalah yang menjadi penghalang atau penghambat hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan.
7. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah saw., pada masanya dikatakan Qodhi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat-tempat yang jauh (kini diatur dalam pasal 1 butir. 3 undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989).⁶

⁵M. Ma'ruf, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Rajawali Press, 1990), h.97

⁶Erfansia Zuhria, M.H *Pengadilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*. Cet 1 UIN (Malang Press 2008)h. 7

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, secara operasional yang dimaksud adalah, mencari hakekat faktor yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan ini membahas tentang “Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai” (Studi Terhadap Hambatan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa). Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini penulis menemukan beberapa buku:

Drs. H. Lomba Sultan, MA. Dkk, dalam bukunya *buku dasar peradilan Islam* membahas tentang pengertian, landasan hukum dan eksistensi peradilan Islam mencakup dasar hukum keberadaanya ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan landasan filosofis.⁷

Drs. H. Raihan A. Rasyid SH dalam bukunya *Hukum acara peradilan Agama* menuliskan mengenai kedudukan pengadilan Agama dan kewenangan hakim sebagai penegak hukum.

Ny somiati, SH. Dalam bukunya *Hukum perkawinan islam dan undang-undang No.1 tahun 1974* Yang pokok bahasannya adalah mengenai hukum perkawinan dan segala permasalahannya diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang mengatur tentang perceraian dan prosedur penyelesaiannya.

⁷ Drs. H. Lomba Sultan, MA. Dkk. *Buku Dasar Peradilan Islam* (Cet 1 CV Berkah Utami, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar 2007), h. 1-2

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Aturan Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989* menuliskan tentang makna kekuasaan kehakiman dan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan *rule of law* dalam Negara hukum Republik Indonesia.

Dari beberapa buku tersebut umumnya hanya menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan Hakim sebagai penegak hukum serta penjelasan tentang perkawinan menurut Undang-Undang.

Dari beberapa pokok masalah yang dibahas oleh penulis di atas belum pernah dibahas oleh penulis lain secara khusus, namun penulis akan membahas dan menelusuri sejauh mana hambatan Hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sinjai.

F. Metode Penelitian

Dan untuk sistematisnya pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu: Metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data.

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu mendekati masalah-masalah yang dibahas dari sudut aspek hukum, karena persoalan yang dibahas merupakan ruang lingkupnya.
- b. Pendekatan Sosiologi, yaitu dengan melihat atau mengkondisikan keadaan yang ada dalam masyarakat khususnya dalam wilayah penelitian

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh sebagai bahan penelitian ini menggunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dengan mempergunakan buku-buku yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.
- b. Studi lapangan (*Field Research*) pengumpulan data yang dilakukan dilokasi penelitian secara langsung dalam rangka pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:
 - 1) Interview, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dengan para Hakim, dan masyarakat yang berperkara.
 - 2) Observasi, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap yang sesuai dengan pembahasan.

3. Metode Pengelolaan Data

- a. Metode Induktif, yaitu penulis memperhatikan yang bersifat khusus kemudian mengambil suatu kesimpulan.
- b. Metode Deduktif, yaitu penulis dalam menarik suatu kesimpulan terlebih dahulu mengemukakan keadaan-keadaan yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses persidangan dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
- b. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa perceraian.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan hakim dalam menyelesaikan sengketa.

10. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

- a. Diharapkan agar dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi penulis dan khasanah ilmu-ilmu hukum utamanya hukum Islam sekaligus sumbangsih pemikiran terhadap mahasiswa lain dan masyarakat yang memerlukannya.
- b. Diharapkan agar dapat menjadi sumbagsih bagi para pihak yang terkait dalam rangka dapat mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SINJAI

A. *Dasar Hukum dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sinjai*

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai.

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor. 5 Tahun 1958 tanggal 6 maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor. 49 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa – Madura

Jadi terhitung tanggal 1 maret 1958 kegiatan masalah perceraian, mawaris ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi tersebut tidak ada lagi.⁸

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai.

Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum kemerdekaan R.I adalah berstatus sebagai suatu *ondrafdeling* yang berada dibawah *afdeling Bhontain*, dikepalai oleh seorang controleur yang membawahi 6 wilayah Adat gemenschap, yaitu :

1. Adat gemenschap Bulu-Bulu Timur.
2. Adat gemenchap Lamatti.

⁸Buku Sejarah Pengadilan Agama Sinjai, Yang Diberikan Kepada Pegawai Pengadilan Agama Sinjai Bagian Umum. Tanggal 15 Juli 2011

3. Adat gemenchap Tondong.
4. Adat gemenchap Bulu-Bulo Barat.
5. Adat gemenchap Manimpahoi.
6. Adat gemenchap Manipi dan Turungan.

Tiap-tiap wilayah gemenchap tersebut dipimpin oleh seorang kepala Adat gemenchap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta yang menguasai beberapa wilayah yang disebut compexen. Tiap-tiap kampung compexen dikepalai oleh seorang kepala Kampung yang bergelar Arung biasa juga disebut Gella, kepala atau Karaeng.

Di dalam setiap wilayah Adat gemenchap tersebut atau di dalam Pemerintah seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi (Pemangku Agama) yang mengurus soal-soal Agama/Keagamaan seperti masalah Munakahat, Mawaris dan lain-lain sedangkan wewenang Qadh-Qadhi tersebut (Yuridikasinya) terbatas pada wilayah pemerintahan Aru tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinan pada waktu itu cukup dilaksanakan oleh Imam saja sebagai Pemangku Agama yang mendampingi kepala compexen (Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu waktu itu.

Setelah adanya penetapan Menteri Agama Nomor. 05 Tahun 1958 tanggal 06 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah terbentuk di Sinjai, sebagai pelaksana peraturan pemerintah Nomor.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah di Daerah luar Jawa –Madura.

Jadi terhitung tanggal 01 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian, mawaris dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Sinjai yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsinya Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi.

1. Sarana dan prasarana

- a. Gedung Pengadilan Agama Sinjai terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kota Sinjai Telepon (0482) 21054 Kode Pos 93651.

- b. Bangunan I

Dibangun pada tahun 1977/1978, diatas tanah seluas 1.259 M2, dengan hak milik Negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP. 73 Nomor. XXV/3/1993 Tahun 1977 dilaksanakan oleh CV. Bontomanai dengan biaya sebesar : Rp. 7.500.000, (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Bangunan II

Dibangun pada tahun 1993/1994, dengan Hak Milik Negara dan luas bangunan 100 M2, melalui DIP 42 Nomor XXV/3/1993 Tahun 1993 dilaksanakan oleh CV. Ramadan dengan biaya sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tuju lima ratus ribu rupia).

Pengadaan Tanah adalah melalui pemberian dari pemda Tk. II Kabupaten Sinjai dengan biaya sebesar Rp. 26. 400.000, (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- d. Kantor Pengadilan Agama Sinjai sejak didirikan sampai sekarang tidak pernah diadakan rehabilitas

2. Daerah

- a. Lokasi dan luas daerah Tingkat II Sinjai adalah 1.052,00.
- b. Pembagian Daerah Tingkat II Sinjai terdiri dari 8 Kecamatan dan 14 Kelurahan serta 64 Desa. Yang Daerahnya terdiri dari pegunungan dan daerah pantai serta pulau-pulau yang tersendiri dari 9 pulau-pulau : Pulau Kambuno, Pulau Liang-Liang Pulau Burung Loe, Pulau Kodingareng, Pulau Katindong, Pulau Batanglampe, Pulau Kanalo I dan Pulau kanalo II serta pulau Larea-rea. Kabupaten Sinjai terletak dari bahagian Selatan dari Sulawesi Selatan, yang bahagian Barat adalah Pegunungan dan Bahagian Timur adalah pesisir pantai.
- c. Batas- Batasannya :
 - 1) Sebelah Utara Kabupaten Bone
 - 2) Sebelah Barat Kabupaten Gowa.
 - 3) Sebelah Timur Teluk Bone.
 - 4) Sebelah Selatan Kabupaten Bulukumba⁹

B. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Sinjai

Makna Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama ialah, Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap permohonan dan gugatan yang diajukan kepadanya yang merupakan tahap paling

⁹Buku Sejarah Pengadilan Agama Sinjai. 2011

awal atau paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan termasuk di Kabupaten Sinjai. Tidak mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara harus lebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama.

Terhadap semua permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi sebagai Pengadilan Tingkat pertama, dia harus menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil apapun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 56 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak tahu, kurang jelas, melainkan wajib menerima, memeriksa dan memutusnya”. Dari pengertian Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama, adalah Pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian setiap perkara termasuk perkara sengketa perceraian. Perkara yang tidak lebih dulu diajukan ke Pengadilan Agama, tidak akan pernah mendapat penyelesaian. Tidak boleh langsung diajukan ke Pengadilan yang tinggi. Karena fungsi Pengadilan yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan tinggi bukan sebagai Pengadilan tingkat pertama tapi melainkan Pengadilan tingkat banding.

Susunan pengadilan Agama secara horizontal, berkedudukan pada setiap kotamadya atau ibu kota Kabupaten termasuk Pengadilan Agama Sinjai. Susunan

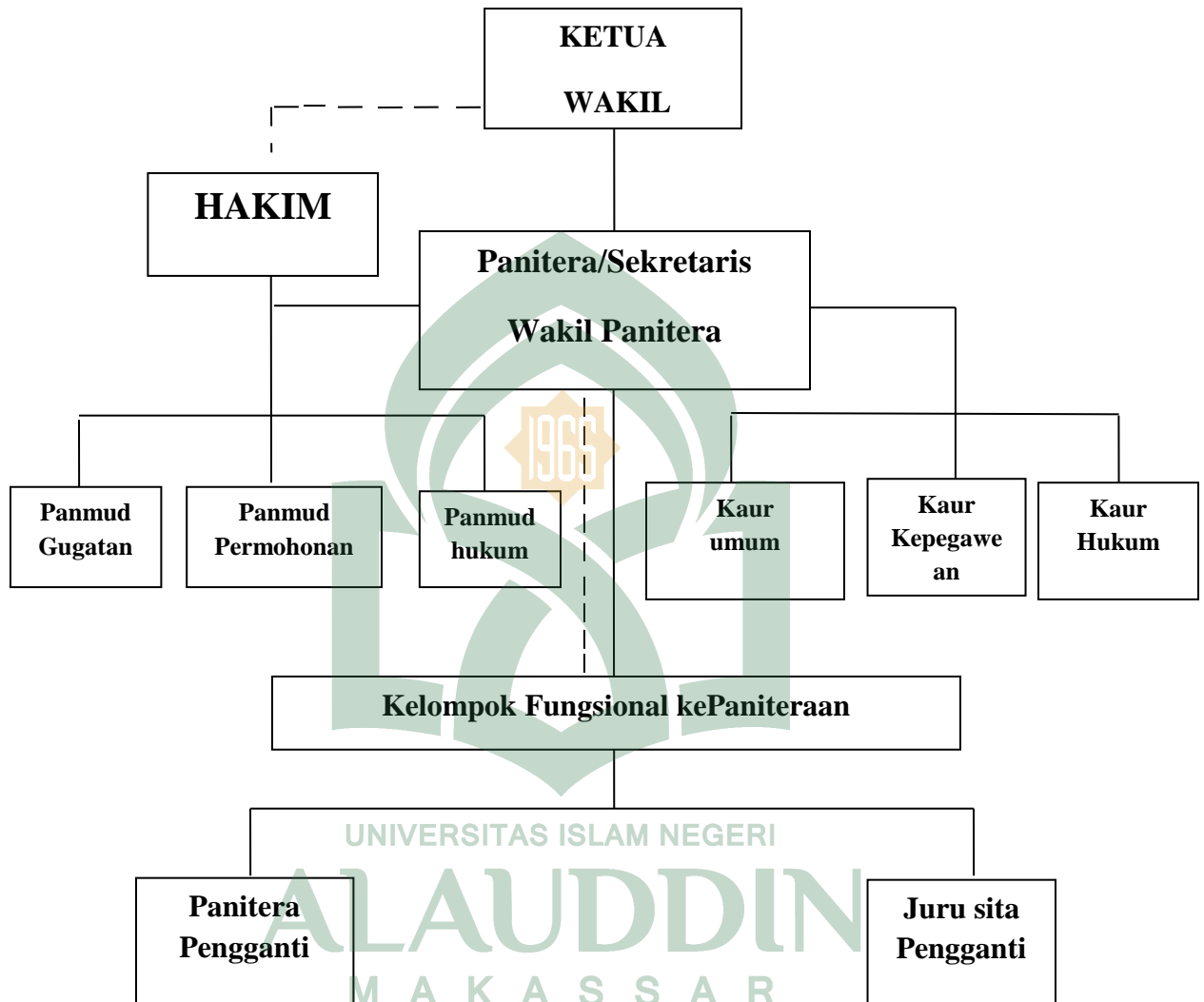
horizontal dengan sendirinya merupakan penentuan batasan kekuasaan daerah hukum masing-masing Pengadilan. Daerah hukum Pengadilan hanya meliputi Daerah Kotamadya atau Daerah Kabupaten dimana ia terletak seluas daerah itulah kewenangan atau kompetensi relatifnya¹⁰

Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusans Presiden, sedangkan Pengadilan tinggi Agama akan dibentuk dengan Undang-Undang. Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama hampir sama, perbedaannya pada Juru Sita dalam kelompok fungsional dan panitera muda. Juru Sita tidak terdapat pada Pengadlan Tinggi Agama karena Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan penyitaan dan eksekusi. Sedangkan jumlah Panitera muda pada Pengadilan Timggi Agama terdiri dari Panitera muda banding dan Panitera muda hukum.

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita

¹⁰M. Yahya Harahap , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Cet I; Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h.107

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai



Sumber data : Pengadilan Agama Sinjai 17 Juli 2

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul ketua Mahkamah Agung.

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti dan beberapa juru sita. Panitera, wakil panitera.

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera Pengadilan merangkap sekretaris Pengadilan. Wakil sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Juru Sita dan juru sita pengganti yaitu, pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan.

C. Kompetensi Pengadilan Agama Sinjai

Berbicara tentang kompetensi atau kewenangan Peradilan Agama Sinjai dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, dapat menyangkut dua hal, yaitu “kompetensi Relatif dan Kompetensi absolut”

1. Kompetensi Relatif

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah pemerintahan Kota atau Kabupaten¹¹

Kompetensi atau kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya antara Pengadilan Agama Sinjai dengan Pengadilan Agama Makassar. Yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Pengadilan Agama Sinjai sendiri berkedudukan di kotamadya atau kabupaten Sinjai itu sendiri. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Sinjai.

2. Kewenangan Absolut

Kekuasaan absolut artinya yang berhubungan dengan jenis perkara suatu Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara dan jenis Pengadilan lainnya. Adapun jenis perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sinjai secara husus dan peradilan Agama secara umum di Indonesia adalah telah dinyatakan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

¹¹Chatib dan Syaepuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama* (Cet, 1; Yogyakarta: UII Pres, 2009). H. 58

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekono¹²mo Syari'ah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yaitu mengenai perkara absolutnya adalah sebagai berikut:

Bidang perkawinan

Dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu terdapat perkara sebanyak 22 perkara dan penulis akan menyebutkannya satu per satu. Dan adapun perkara dalam bidang perkawinan itu adalah.

- a. Izin beristri lebih dari satu;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada beberapa pendapat;
- c. Dispenses kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan pekawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah);
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;

¹²*Ibid*, h.13

- j. penyelesaian harta bersama (harta gono gini);
- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau seorang anak;
- o. Putusan tentang percabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Menunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya.
- t. Penetapan asal usul anak.
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya sebelum lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain;

w. Wali *adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu;¹³

Bidang Kewarisan

Salah satu asas sentral dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah asas personalitas keislaman. Asas ini dipandang sebagai salah satu dasar untuk menegakkan eksistensi lingkungan peradilan Agama. Dengan demikian, sengketa warisan yang terjadi diantara sesama orang Islam tanpa terkecuali, kewenangan mengadilinya tunduk kepada lingkungan peradilan Agama.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian masing-masing ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dua ketentuan.

1. Pembagian berdasarkan keputusan Pengadilan yaitu pembagian yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

¹³Dr. Mmardani *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafik, 2009) h 55-56

2. Pembagian berdasarkan pemohon pertolongan, yaitu pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan diluar sengketa.

Bidang Wasiat

Pasal 49 huruf c Undang-Undang Tahun 2006 tentang peradilan Agama mengatakan bahwa wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda kepada seseorang atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Dalam praktik secara Islam tidak berbeda dengan testament yang diatur dalam pasal 875 kitab undang-undang hukum perdata yang menjelaskan bahwa :surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya dan terjadi setelah wafat.

Bidang Hibah

Dalam penjelasan pasal 49 huruf d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tentang imbalan seseorang atau badan hukum.

Dalam terminology hibah menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf g telah menyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan terminologi hibah dalam kitab undang-undang hukum perdata terdapat dalam pasal 166 yang menyebutkan bahwa hibah adalah suatu persetujuan yang mana

si penghibah semasa hidup dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dalam menyerahkan suatu benda guna kepentingan si penerima hibah.

Kalau diperhatikan ketentuan hibah yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam dan BW, maka akan terlihat bahwa sepanjang hibah dilakukan secara tertulis dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara hibah menurut BW dan hibah menurut hukum Islam. Namun, hibah dalam hukum Islam dapat dibenarkan secara lisan dan tulisan sedangkan hibah berdasarkan BW terdapat keharusan dilaksanakan dengan akta notaris.¹⁴

Bidang Wakaf

Dalam penjelasan pasal 49 huruf e Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama bahwa wakaf sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 yang menyebutkan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁴*Ibid.* h. 56

Bidang Zakat

Dalam penjelasan pasal 49 huruf f, bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau dilihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 huruf c disana tidak secara literal disebutkan zakat sebagai kewenangan peradilan Agama, tetapi karena dalam Islam sedekah terdiri dari sedekah wajib dan sedekah sunnah, maka zakat juga termasuk kewenangan peradilan Agama.

Bidang Infak

Dalam penjelasan pasal 49 huruf g, undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberi rezki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan niat karena Allah s.w.t.

Bidang Shadaqah

Dalam penjelasan pasal 49 huruf h, disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah s.w.t.

Bidang Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh prinsip

syariah, antara lain meliputi: (1) Bank Syariah, (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (3) Asuransi Syariah, (4) Reasuransi Syariah, (5) Reksadana Syariah, (6) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, (7) Sekuritas Syariah, (8) Pembiayaan Syariah, (9) Pegadaian Syariah (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, (11) Bisnis Syariah.¹⁵



¹⁵*Ibid.* h. 58

BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut juga “at-talak” yang secara bahasa (Etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan. Dalam bahasa Indonesia, kata perceraian berasal dari awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak sehingga menjadi “perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.¹⁶

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat imam madzhab, imam syafi’I berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara umum dikemukakanlah oleh Imam Malik yang artinya talak sebagai sifat hukum khusus yang menyebabkan kehalalan hubungan suami istri. pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 117

¹⁶ Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996), h. 163

yang menyatakan: "talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab terjadinya perceraian".¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri. Adapun dasar hukum perceraian dalam sura al-baqarah ayat 232 yang berbunyi;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui." [146] kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.¹⁸

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa apabila selesai ditalak dan selesai masa iddahny maka tidak ada hak para wali untuk menghalangi mereka untuk kawin

¹⁷ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet. V. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996), h. 1776

¹⁸ Departemen Agama R.I., , *loc. cit.*

lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.

2. Dasar Hukum Perceraian

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., banyak yang menjelaskan tentang perceraian atau menjelaskan tentang talak. Selain itu, dijelaskan pula di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Di dalam Qs. at-Talak (65): 1; Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّوْنَهَا حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁹

¹⁹Depertemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya :PN. Mahkota, 1999), h.945

Didalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat menghadapi iddahnya, jadi para suami dilarang menceraikan isterinya dalam keadaan masih iddah.

Diayat yang lain Allah. SWT. Berfirman dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 236:1

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Terjemahnya:

tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁰

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi suami yang menceraikan isteri-isterinya sebelum bercampur dengan mereka maka tidak diwajibkan membayar mahar, akan tetapi hendaklah memberikan suatu mut'ah kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Rasulullah SAW . Bersabda :

عن عائشة ان رسول الله صل الله عليه سلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتزوج رجل فيطلقها قبل أن يد حل بها اتحل الزوجها الاول قال حتى يزوق عسلتها

Artinya:

²⁰ Ibid.,h 59.

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah ditanya tentang wanita yang dinikahi kemudian diceraikannya, lalu wanita itu dinikahi oleh lelaki pertama? Rasulullah SAW. Menjawab “tidak “ sampai (lelaki kedua) pernah merasakan madunya (menggaullinya)”

Berdasarkan keterangan ayat dan hadits tersebut diatas, dapat dipahami bahwa di dalam Al-Qur'an ada aturan-aturan hukum tentang hal ihwal perceraian/talak. Selanjutnya dikemukakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian yang berlaku secara positif .

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cerai talak dan cerai gugat sangat banyak. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, hanya akan dikemukakan beberapa peraturan yang dianggap sangat urgen dengan permasalahan dalam pembahasan ini.

1. Cerai Talak

- a. Undang- undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pasal 66-72
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 14-18
- c. Instruksi Persiden RI Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-148

Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 dikemukakan:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang, guna menyaksikan ikrar talak.”²¹

Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975

“seorang suami yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam. Yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada di Pengadilan Agama ditempat tinggalnya yang memberi pengetahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dan beserta alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan ini.”²²

Kompilasi Hukum Islam pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena tidak atau berdasarkan gugatan perceraian.”²³

3. Cerai Gugat

- a. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- b. Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 20-26
- c. Intruksi Persiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-148.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974:

²¹Undang-undang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: PN. Dharma Bhakti, 1989), h.76

²²Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Islam* op.cit. H. 254

²³Departemen Agama RI *Kompilasi Hukum Islam*, Op.Cit, h. 56.

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara pengajuan gugatan tersebut pada ayat 1. Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 20 peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 :

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”²⁴

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 :

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat.”²⁵

Pasal 14 kompilasi hukum Islam menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena tidak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perceraian selain diatur dalam dalil-dalil syara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik sebagai sumber hukum materil maupun sebagai sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama. Penyelesaian cerai talak dan cerai gugat dalam pasal-pasal tersebut diatas, kadang-kadang dimuat dalam satu pasal yang sama, sehingga dalam pembahasan ini dikemukakan pasal yang dikutip secara berulang.²⁶

B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

²⁴Departemen Agama RI., *Bahan Penyuluhan Islam.*, Op, Cit.h.256

²⁵Undang-Undang Peradilan Agama., Op.Cit,h.18

²⁶Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam.* Op, Cit. 26

Pergaulan suami isteri dalam suatu rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa dan raga serta rasa cinta. Suami isteri yang hidup seataap, setempat tidur, itu memerlukan persesuaian watak dan persesuaian tabiat agar bahtera rumah tangganya dapat berjalan sesuai, dan dengan persesuaian tersebut diharapkan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Tujuan dan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan dalam rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, banyak dijumpai bahwa tujuan mulya perkawinan tidak diajudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak, misalnya faktor psikologi, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain-lain.

Agama Islam tidak menutup jalan terhadap hal-hal tersebut diatas dengan kata lain Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu kemungkinannya suatu perceraian. Baik melalui cerai talak maupun cerai gugat, jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Ada tiga hal mendasar yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai mulai dari tahun 2007-2011

| No | Uraian | Tahunan | | | | | Prosentase (%) | | | | |
|----|--------------------------|---------|----|----|-----|-----|----------------|-------|------|------|-----|
| | | 07 | 08 | 09 | 010 | 011 | 07 | 08 | 09 | 010 | 011 |
| 1. | Faktor Moral | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 2. | Meninggalkan kewajiban | 85 | 89 | 32 | 82 | 101 | 29,1 | 39,48 | 29,0 | 76,2 | 47 |
| 3. | Terus Menerus Berselisih | 208 | 99 | 98 | 99 | 141 | 62,9 | 68,6 | 50,0 | 70,0 | 58 |

Sumber data : Buku Laporan bulanan Pengadilan Agama Sinjai 2011

1. Faktor Moral

Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Sinjai untuk tahun 2007 berjumlah 8 Buah, sejumlah perkarah tersebut moral, kalupun ada sangatlah minim. Minimnya perceraian karena kerusakan moral sangatlah dipengaruhi oleh faktor masyarakat Kabupaten Sinjai yang Agamis. Disamping juga faktor adat Kabupaten Sinjai yang sangat menjunjung tinggi moral.

Perilaku masyarakat Sinjai yang sangat menjunjung tinggi moralitas itu membuktikan bahwa Agama Islam telah masuk dan meresap dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti bahwa faktor terjadinya perceraian karena moral dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan bahkan untuk tahun 2010 dan tahun 2011 tidak ada sama sekali.

2. Meningalkan Kewajiban

Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Sinjai cukup tinggi. Bila dibandingkan kabupaten lain dalam wilaya Sulawesi Selatan. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat Kabupaten Sinjai yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Bagi mereka yang hidup digaris kemiskinan, pada umumnya mengambil jalan keluar dengan cara pergi merantau kedaerah lain, seperti malesia, kalimantang dan lain-lain. Dan yang menjadi masalah adalah bila salasatu diantara Suami Isteri pergi merantau, sudah barang tentu kewajiban sebagai Suami Isteri suda tdak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Yag lebih parah lagi, kebanyakan dari mereka yang

pergi merantau itu kemudian lupa akan anak dan isterinya bahkan tidak sedikit diantara mereka mengambil kesimpulan dalam kesendiriannya untuk kawin lagi.

Sedangkan bagi Isteri yang pergi merantau ke daerah lain, pada umumnya karena faktor keluarga si isteri sudah lamah merantau kemudian menetap disana. Disamping juga suasana rumah tangga kurang harmonis, penuh dengan muatan-muatan pertengkaran yang akibatnya si isteri tidak betah tinggal bersama suaminya, yang pada gilirannya si isteri meninggalkan Suami pergi menyusul keluarganya di tempat perantauannya. Faktor-faktor inilah yang banyak menyebabkan si isteri atau suami meninggalkan pihak lain, sehingga pihak yang ditinggalkan begitu lama tanpa adanya kabar berita mengajukan gugatan cerai/permohonan izin talaq kepada Pengadilan Agama yang menuntut undang-undang alasan dapat diterima.

3. Terus Menerus Berselisih.

Dalam kehidupan rumah tangga yang namanya perbedaan pandangan adalah merupakan hal yang biasa. Orang bilang justru dengan pertengkaran akan menambah keakraban dan kasih sayang antara keduanya. Namun yang menjadi persoalan apakah percekocokan antara suami isteri bisah teratasi atau tidak.

Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya suatu percekocokan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Kurang matang (belum dewasa);
- b. Belum siap berumah tangga;
- c. Kawin dibawah umur
- d. Campur tangan pihak ketiga

Keempat faktor tersebut diatas, semuanya dikembalikan kepada suami isteri yang bersangkutan.²⁷

C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perceraian di pengadilan Agama Sinjai

1. Cerai talak

Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989).
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989).
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

1. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989).
- b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan

²⁷Buku Laporan Bulanan Pengadilan Agama Sinjai, Yang Diberikan Kepada Panitra Pengadilan Agama Sinjai. 15 Juli 2011

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989).

- c. Bila Termohon berkediaman diluar Negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989).
- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diluar Negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989).

2. Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarekan posita);

3. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989).

4. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU No 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Penyelesaian Perkara

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahap persidangan;
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU No 7 Tahun 1989).
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2003).
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - Permohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.²⁸

2. Cerai Gugat

1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :

²⁸Buku panduan Pengadilan Agama Sinjai Yang di Berikan Kepada Panitra Pengadilan Agama Sinjai. 15 Juli 2011

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989).
 - b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989).
 - c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989).
 - b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989).
 - c. Bila Penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989).
 - d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang

daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989).

3. Gugatan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, Agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat..
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarekan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU No 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
7. Penyelesain Perkara
- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 - b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
8. Tahap persidangan;

- a. Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan.
 - b. Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2003).
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
9. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- a. Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - b. Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - c. Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
10. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.²⁹

²⁹ Buku Pedoman Pengadilan Agama Sinjai 2011

BAB IV

ANALISIS PERANAN HAKIM DAN HAMBATANNYA DALAM

MENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SINJAI

A. Sistem Pegadilan Agama Sinjai Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian

Sistem Pengadilan Agama Sinjai dalam menyelesaikan sengketa Perceraian, pada dasarnya melalui dua tahap yaitu administrasi dan proses persidangan

1. Tahap Administrasi

Pada tahap pengadministrasian perkara ada beberapa prosedur yang harus dilalui agar perkara tersebut memenuhi tata cara pengelolaan administrasi di Pengadilan Agama Sinjai. Dan ini sangat sejalan dengan penjelasan angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengolahan administrasi peradilan.

Dalam proses pengadministrasian atau penerimaan perkara di Pengadilan Agama Sinjai melalui beberapa meja:

a. Meja pertama

- 1) Menerima perkara gugatan dan permohonan.
- 2) Menentukan atau menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).

- 3) Menyerahkan surat gugatan dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar uang panjar perkara kepada pemegang kas Pengadilan Agama Sinjai kemudian membukukan uang panjar tersebut pada jurnal keuangan perkara, mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat dua rangkap, lembar satu disimpan kasir dan lembar dua diserahkan pada panitera.
- 4) Panitera atau staf panitera yang ditunjuk surat keputusan ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku induk yang bersangkutan.

b. Meja Kedua

- 1) Mendaftar perkara sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
- 2) Berkas perkara dilengkapi dengan formulir penetapan mejelis Hakim yang disampaikan pada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Peradilan Agama Sinjai melalui panitera.
- 3) Perkara yang sudah ditetapkan mejelis Hakim, segera diserahkan kepada mejelis Hakim yang ditunjuk.
- 4) Penetapan hari sidang oleh majelis Hakim.
- 5) Pemanggilan para pihak oleh juru sita.

c. Meja Ketiga

Tugas meja ketiga pada dasarnya setelah perkara tersebut oleh majelis Hakim memutus perkara.³⁰

2. Tahap persidangan

a. Pemanggilan para pihak yang berseengketa.

Salah satu sistem Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah, melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa. Sebelum sidang dibuka atau dimulai terlebih dahulu pihak Pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Yaitu, bahwa para pihak yang berperkara dipanggil secara resmi, dan langsung ketempat kediaman para pihak jika para pihak baik penggugat maupun tergugat diketahui tempat tinggalnya. panggilan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya peradilan sepihak yaitu hanya dihadiri oleh pihak lain. Tentunya agar keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan.³¹

Pentingnya pemanggilan tersebut dinyatakan dalam pasal 138 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam:

Setiap kali diadakan sidang, Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Pernyataan yang senada juga dijumpai pasal 55 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa;

³⁰Buku Pedoman Pengadilan Agama Sinjai 2011

³¹H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1998), h. 56.

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan Permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.³²

Dengan demikian salah satu sistem penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah, melakukan pemanggilan kepada para pihak secara patut dan resmi. Setelah melalui serangkaian proses administrasi perkara sebagai tujuan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan. Apabila panggilan kepada penggugat dan tergugat belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan sengketa perceraian maupun persidangan perkara lain belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya Hakim hanya boleh mengambil sikap memerintahkan untuk memanggil pihak yang belum dipanggil. Secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.

Setelah majlis Hakim melihat bahwa panggilan kepada penggugat maupun tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan di dalam persidangan.

Jadi pada tanggal dan hari persidangan pertama yang telah ditetapkan dan para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka ada lima kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

1. Penggugat dan tergugat tidak hadir
2. Penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir.

³²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pearadilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989* (Cet, 3; Jakarta: Sinar Grafika. 2005). h.23

3. Penggugat hadir tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan jawaban
4. Penggugat tidak hadir, sedangkan tergugat hadir.
5. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan

Terkait dengan kelima poin diatas yang menjadi pembahasan selanjutnya dari penulis adalah, poin yang kelima karena dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai antara penggugat maupun tergugat sama-sama hadir pada sidang pertama.

Jadi karena kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan pertama maka proses penyelesaian sengketa perceraian selanjutnya adalah:

- b. Perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa.

Apabila penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan pada tanggal dan hari yang telah ditetapkan, majlis Hakim kemudian memasuki tahapan sidang pertama dengan persidangan secara umum, kemudian mendamaikan antara penggugat dan tergugat, sebagaimana yang telah diatur pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang maksud atau niatnya dalam berperkara diselesaikan secara damai menasehati atau dakwah Islamiyah merupakan suatu kewajiban bagi setiap ummat Islam, dalam melaksanakan dakwah itu sendiri ummat Islam dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan taraf kemampuannya masing-masing. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami antara lain firman Allah SWT. QS.An-Nahl (16) : 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِّلْهُمْ بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

Terjemahnya :

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hukmah dan pelajaran yang baik dan bantalah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk.³³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT. Menyerukan agar mengajak hamba-hamba Allah ke jalan-nya. Yakni bahwa setiap muslim diwajibkan untuk melakukan dakwah, agar kebenaran Agama yang telah diterima dapat dinikmati orang lain. Kebenaran inilah yang harus disampaikan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat dengan sikap dan pandangan yang bijak, nasehat yang indah, serta argumentasi yang kokoh.

Pada ayat yang lain Allah SWT, berfirman QS. Al-Hujurat (49) : 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Menurut hemat penulis bahwa ukhuwah Islamiyah dapat melenyapkan permusuhan menumbuhkan persatuan merapatkan jiwa yang telah berantakan dan menjelmakan semangat lahir bathin. Persaudaraan telah mengikat jiwa dan hati menjadi satu keluarga besar. Suka duka bersama, satu sakit, sakit semua,. Jika kekurangan sama-sama bantu membantu apabila tersesat dan bersalah sama-sama memberi nasehat dan teguran. Yang lemah dibantu dengan perlakuan yang baik

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2007), h. 281.

sehingga terjalin persaudaraan dan kasih sayang, karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu kewajiban bagi para penguasa termasuk Hakim dalam mencegah perbuatan tersebut dan menyuruh berbuat baik, nasehat yang indah dan sebagainya, guna terwujudnya persatuan, keutuhan baik dalam masyarakat, keluarga maupun rumah tangga.

c. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat.

Dalam hal ini majlis Hakim tidak bisa mendamaikan pihak yang berperkara, maka tahapan berikutnya adalah membacakan surat gugatan. Setelah surat gugatan dibacakan dalam hal ini isinya tetap dipertahankan telah paham maksud dan tujuan gugatan penggugat, maka tahapan selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat tersebut. Dalam hal tergugat menjawab gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan yang dapat diajukan tergugat yaitu

1) Eksepsi

Yaitu tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

2) Tuntutan provisi

Menurut Darwan Print merumuskan terminology gugatan provisional sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama dalam proses perkara masih berlangsung.

3) Mengajukan gugat balik (rekonvensi)

Rekonvensi muncul manakala tergugat mengajukan tuntutan kepada penggugat. Namun demikian tidak setiap gugatan yang diajukan penggugat dapat dibalas oleh tergugat dengan mengajukan gugatan balik, dalam kaitannya dengan ini, Abdul Mannan menyebutkan bahwa tidak semua gugatan penggugat dibalas dengan gugatan rekonvensi, tergugat baru dapat mengajukan gugat balik apabila yang digugat berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama. Dengan demikian, rekonvensi tidak dapat dilakukan terhadap yang berkaitan dengan hukum perorangan.

4) Jawaban terhadap pokok perkara.

Dalam hal tergugat memberikan jawaban terhadap pokok perkara ada tiga kemungkinan yaitu, mengakui secara murni dan bulat atas dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengakuan berklausula yaitu pengakuan yang dibarengi dengan pembebasan dari apa yang digugat oleh penggugat dan yang terakhir membantah dengan tegas atas dalil gugatan penggugat maka dalam hal ini pemeriksaan sengketa perceraian kemudian dilanjutkan sampai pada tahap pembuktian, dari sini akan diketahui apakah gugatan penggugat terbukti atau tidak.³⁴

d. Replik penggugat

³⁴Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Peradilan Agama* (cet, Yogyakarta: UII Pres, 2009). h. 88

Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Replik harus disesuaikan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respon penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Replik penggugat ini dapat berisi pembenaran atas jawaban tergugat atau boleh jadi penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

e. Duplik tergugat

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil yang diajukan penggugat dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan penggugat. Tahapan replik dan duplik ini dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antar penggugat dengan tergugat atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dan tergugat.

f. Pembuktian para pihak yang berperkara

Cara atau langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah membebani para pihak untuk mengajukan bukti-bukti, sebagai penguat atas gugatan atau keterangan yang mereka kemukakan. Terutama pihak pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat-surat seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam tahap pembuktian ini, penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti yang secara enumeratif diatur dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg/ 1866 BW yaitu: alat bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi persangkaan, pengakuan dan sumpah.

g. Kesimpulan.

Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, kesimpulan tersebut dapat diajukan secara lisan dan tulisan tetapi dalam prakteknya itu biasanya dengan cara lisan.

h. Musyawarah Hakim.

Setelah para pihak mengajukan alat-alat bukti atau pembuktian mereka, majlis Hakim telah menilai masing-masing bukti-bukti tersebut, maka cara atau langkah selanjutnya yang dilakukan oleh majlis Hakim adalah, musyawarah untuk mufakat, yakni majlis Hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan keputusan yang akan diputus, tentunya berlandaskan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mengatur sifat musyawarah majlis Hakim dalam bentuk rapat rahasia. Selanjutnya dalam ayat (4) diatur tentang tata cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah majlis Hakim, yaitu harus dalam bentuk tertulis dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian dalam ayat (5) diatur tentang kemungkinan yang harus dilakukan apabila dalam rapat permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat.

Pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan ini lebih dikenal dengan *the setting of opinion*

Sedangkan dalam syari'at Islam, musyawarah merupakan dasar utama yang dianggap sebagai lembaga yang sangat penting artinya bagi penentuan arah kebijaksanaan. Sebagi dasar tersebut, firman Allah SWT. Antara lain dalam QS. Asy-Syuura ayat 38 sebagai berikut

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan bagi orang-orang yang beriman atau (mematuhi)seruan tuhanmu dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Seiring dengan hal tersebut, AL-Maraghi mengemukakan bahwa apabila menghadapi sesuatu urusan maka bermusyawarahlah, agar urusan dan masalah itu dibahas dan dipelajari bersama-sama dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan landasan atau satu hal yang sangat penting terutama dalam menagani atau menyelesaikan suatu urusan atau masalah termasuk masalah sengketa kewarisan.

i. Putusan majlis Hakim.

Setelah majlis Hakim melaksanakan tentang perkara tersebut, dan mereka telah memahami atau meyakini tentang hukumnya maka majlis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.³⁵

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah hal yang menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikto Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah, realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam pelaksanaa putusan di Pengadilan Agama Sinjai biasa dilakukan dan dibacakan isi putusan dalam persidangan dalam hal ini Hakim memerintahkan pengosongan benda tetap dan melakukan suatu perbuatan kepada orang yang dikalahkan.

Jadi dari uraian tersebut dapat disimpulkan sistem penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai antara lain: 1. Memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, 2. Upaya perdamaian, 3. Pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, 4. Replik penggugat, 5. Duplik penggugat, 6. Membebani kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti, 7. Kesimpulan, 8. Musyawarah Hakim, yakni majelis Hakim bermusyawarah untuk memperoleh mufakat tentang kesimpulan putusan yang akan diputuskan, menjatuhkan putusan, yakni memutuskan perkara terhadap para pihak.

³⁵Hasil Wawancara dengan Jamaluddin S.Ag. SE. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Pada Tanggal 25 Juli 2011 di Pengadilan Agama Sinjai

B. Hambatan Pengadilan Agama Sinjai Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Dalam Administrasi Perkara dan Persidangannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sinjai tentang Hambatan yang dialami dalam menyelesaikan perkara sengketa perceraian, pada dasarnya hambatan tersebut bisa dibagi dalam dua bagian yaitu: hambatan proses administrasi dan hambatan dalam persidangan.

1. Hambatan administrasi

Pada dasarnya administrasi perkara Pengadilan Agama Sinjai tidak terlalu merasakan dampak kesulitan ataupun hambatan dalam menangani administrasi perkara didalam Pengadilan Agama Sinjai. Akan tetapi ada beberapa hal yang oleh Pengadilan Agama Sinji dianggap suatu hambatan itu diakibatkan oleh para pihak yang berperkara itu sendiri. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu adanya keterlambatan dalam proses administrasi perkara, yang dalam hal ini adanya keterlambatan dalam proses administrasi perkara dan itu diakibatkan oleh pihak yang berperkara, dimana adanya keterlambatan para pihak untuk menghadiri proses persidangan, yang mana ketika pihak Pengadilan Agama Sinjai melakukan penetapan hari sidang dan dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi terkadang pihak yang berperkara tidak mematuhi panggilan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai, sehingga proses penanganan

perkara tersebut lambat terselesaikan. Dan problem yang lain adalah biaya perkara oleh para pihak yang berperkara dianggap mahal.³⁶

Proses keterlambata tersebut itu diakibatkan karena yang berperkara kurang paham mengenai masalah hukum dan pentingnya hukum itu sendiri baik dalam proses administrasi dan proses persidangan atau dengan kata lain masyarakat kurang memahami akan pentingnya hukum dalam menciptakan ketemtraman dan keadilan.

Sehingga kalau dirinci hambatan yang dirasakan oleh Pengadilan Agama Sinjai dalam menangani sengketa perceraian dalam proses administrasi yaitu:

- a. Pihak yang berperkara tidak mematuhi pemanggilan hari sidang yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai.
- b. Masyarakat yang berperkara kurang paham mengenai pentingnya suatu pemahaman tentang hukum.
- c. Tidak terjangkaunya pembayaran biaya perkara oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga ada ketidak seriusan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sinjai sehingga hal seperti ini tidak saja harus dicarikan solusi akan tetapi juga sebagai penghambat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang menyatakan: “Peradilan dilaksanakan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

³⁶Hasil Wawancara Dengan Drs Alyah Salam M.H Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai Pada Tanggal 18 Juli 2011 di Kantor Pengadilan Agama Sinjai

2. Proses Persidangan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Sinjai dalam menangani perkara sengketa perceraian ada berapa hal hambatan yaitu mengenai hak asuh anak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai sulit memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.

Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.³⁷

Dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sinjai di atas berjalan sesuai dengan pemeriksaan perkara, akan tetapi pada tahap pembuktian Pengadilan Agama Sinjai mengalami suatu hambatan yaitu tidak adanya bukti yang autentik yang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut, maka ketika para pihak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sinjai, karena menganggap ada haknya yang tidak terpenuhi atau ada keganjilan dalam pemeliharaan sehingga Pengadilan Agama Sinjai dalam menangani perkara tersebut

³⁷Hasil Wawancara Dengan Siti Jannatul Hilmi, MA. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Pada Tanggal 20 Juli 2011 di Kantor Pengadilan Agama Sinjai

merasakan hambatan dalam memutuskan karena tidak adanya aturan yang jelas yang dijadikan dasar untuk memutuskan kasus tersebut yang ada hanya bukti sumpah yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara.

a. Pembuktian

Secara etimologi pembuktian berasal dari kata bukti dengan memberikan imbuhan awalan *pem* dan akhiran *an* yang oleh kamus besar bahasa Indonesia dirumuskan sebagai, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata. Secara terminologi pengertian pembuktian penulis mengutip pendapat subekti yang menyebutkan sebagai upaya untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

b. Bukti tertulis (surat).

Banyak definisi surat yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi penulis mengungkapkan pengertian surat yang lebih eksklusif adalah pengertian yang dirumuskan oleh Sudikti mertokusumo yang menyebutkan surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan rasa hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan surat adalah sebagai buah pikiran seseorang yang diwujudkan dalam sesuatu benda yang memuat tanda baca dan dipergunakan untuk pembuktian.

Pada dasarnya surat dibagi pada akta dan non akta, surat non akta adalah berupa surat biasa/koresponden, catatan harian, resi, karcis dan sebagainya

sedangkan surat non akta yaitu suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan tanda-tanda oleh pembuatnya yaitu, akta otentik, akta dibawah tangan dan akta sepihak.

c. Alat bukti saksi.

Pengertian saksi menurut penulis kutip yaitu, defenesi yang dikutip oleh sudikno merokusumo yang merumuskan sebagai kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan peribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.

Nilai pembuktian alat bukti saksi adalah bersifat bebas, karena nilai kebenaran yang terkandung di dalam bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada Hakim, sehingga Hakim bebas untuk memberikan penilaian.

d. Persangkaan.

Dalam pasal 1915 KUH, perdata dirumuskan persangkaan sebagi kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

e. Persangkaan menurut Undang-Undang.

Dan adapun nilai kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga biasa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.

f. Pembuktian menurut hakim.

Nilai pembuktiannya adalah tidak sempurna, sehingga hakim tidak boleh berdasarkan putusannya hanya satu persangkaan. Tetapi menurut A. pitlo sudah tidak lagi, sehingga satu peristiwa saja sudah dianggap cukup.

g. Pengakuan.

Terminologi pengakuan sebagai alat bukti menurut rumusan yang dikemukakan oleh A. pitlo adalah sebagai keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan murni dan bulat adalah sempurna dan mengikat, karenanya dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan alat bukti. Sedangkan nilai kekuatan pembuktian pengakuan bersyarat adalah tidak sempurna, kekuatan pembuktiannya bebas tidak mengikat dan hanya merupakan bukti permulaan saja karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan tambahan salah satu alat bukti.

h. Sumpah

Pengertian sumpah sesuai dengan yang dirumuskan oleh Sudikno Merokusumo adalah sebagai pernyataan yang khidmat yang diberikan atau yang diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa dari pada tuhan dan percaya, bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

C. Solusi Yang dicapai oleh Pengadilan Agama Sinjai Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Perceraian

Dari hambatan-hambatan yang telah dirasakan oleh Pengadilan Agama Sinjai dalam menyelesaikan perkara sengketa perceraian tidak terlepas dari pihak Pengadilan Agama Sinjai sebagai instansi penegak hukum, dan masyarakat sebagai pihak yang berperkara.

Maka dalam hal ini perlu kiranya keluar dari problem atau hambatan tersebut sehingga nantiya penanganan perkara berjalan lancar tanpa ada hambatan/ problem yang serius.

Jadi sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk kelaui dari hambatan dan mencapai suatu solusi dari hambatan tersebut maka pihak Pengadilan Agama Sinjai akan mengadakan suatu bimbingan dan penyuluhan oleh pihak Pengadilan Agama yaitu mengenai masalah hukum terhusus hukum perdata, dan bekerja sama dengan pihak terkait sehingga nantinya masyarakat paham betul bahwa betapa pentingnya hukum itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang adil, beradap, aman, damai, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat sampai pada berbangsa dan bernegara.³⁸

Dan selanjutnya agar supaya proses penanganan administrasi perkara sederhana, cepat dan biaya ringan maka dari pihak Pengadilan Agama Sinjai harus melakukan percepatan dalam proses pengadmiistrasian mulai dari masuknya perkara

³⁸Hasil Wawancara Dengan Drs. Zainuddin, SH Hakim Pengadilan Agama Sinjai Pada Tanggal 25 Juli 2011 di Kantor Pengadilan Agama Sinjai

sampai pada pemanggilan. Dan tentunya hal tersebut para pegawai harus aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Dan solusi selanjutnya adalah apabila ada para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara Pengadilan Agama Sinjai menyelesaikan perkaranya dengan Cuma-Cuma. Dan dalam hal persidangan Hakim sulit memutuskan karena tidak adanya aturan yang jelas dan tidak dapat membuktikan pembuktian secara otentik sehingga Pengadila Agama Sinjai agak sulit dalam mengambil keputusan. Maka solusinya adalah Pengadilan Agama Sinjai harus lebih cermat/teliti dalam memutuskan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan Pengadilan Agama Sinjai meliputi kewenangan relative dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah meliputi pada wilayah dimana Pengadilan Agama itu tinggal, contoh Pengadilan Agama Sinjai wilayah hukumnya pada daerah kabupaten Sinjai itu sendiri, sedangkan kewenangan absolut yaitu, kewenangan Pengadilan Agama terkait mengenai masalah jenis perkara perdata yang menjadi kewenangannya seperti Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infak, Zakat, Shadakah, dan Ekonomi syari'ah.

1. Sistem penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yakni ada dua tahap:

a. Proses administrasi

Memasukkan perkara pada meja pertama kemudian membuatkan SKUM dan pembayaran biaya perkara pada kasir, selanjutnya pada meja kedua pendaftaran perkara, penetapan majlis Hakim, penetapan hari sidang oleh majlis Hakim dan panggilan para pihak melalui juru sita.

b. Proses persidangan

Yang dimulai dengan perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah dan putusan.

2. Hambatan Pengadilan Agama Sinjai dalam menyelesaikan perkara sengketa perceraian yaitu ada melalui dua proses yaitu:

a. Proses administrasi

Dimana pemanggilan dan hari sidang tidak dipenuhi dengan baik oleh para pihak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai dan ada kesan bahwa mengenai masalah biaya perkara kurang dijangkau oleh para pihak, kemudian adanya ketidak pahamanan para pihak berperkara tentang hukum dan proses administrasi perkara.

b. Proses persidangan

Hambatan yang dirasakan yaitu pada saat persidangan dalam sengketa perceraian khususnya hak atas kuasa asuh anak, karena sampai saat ini belum ada aturan yang yang jelas di dalam undang-undang.

3. Solusi yang ingin dicapai dalam mengatasi hal tersebut yaitu:

- a. Peradilan Agama Sinjai harus melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai masalah hukum terhusus hukum perdata.
- b. Melakukan percepatan dan proses pengadministrasian perkara
- c. Pengadilan Agama Sinjai harus menggeratkan biaya perkara bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara
- d. Mengadakan penyuluhan terkait masalah pentingnya akta tertulis sebagai bukti yang autentik.

B. Saran-saran

Sesuai dengan pepatah arab mengatakan “*al-insānu mahallul khathāi wan nisyān*” yang berarti sesungguhnya manusia adalah tempatnya kesalahan dan kekhilafan. Olehnya itu, selaku penulis tidak meragukan adanya unsur kesalahan dan

kekeliruan di dalam penulisan skripsi tersebut sehingga dengan ini diharap kepada segenap pembaca untuk memberikan saran dan masukannya guna peningkatan kredibilitas penulisan skripsi tersebut. Semoga dengan ini, niat dan tujuan baik yang kita harapkan bersama dapat terwujud dan senantiasa diridoi oleh Allah SWT. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaeni dan Adnan Basit Abdul. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Juz XXV Mesir : AL-Babi Al halabi, 1974.
- Bisri, Hasan Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2007.
- Drs. H. Lomba Sultan, MA. Dkk, *Buku Dasar Peradilan Islam* CV Berkah Utami, Jl Sultan Alauddin Makassar 2007
- Direktorat Departemen Agama RI, *Hukum Acara Menurut Syariah Islam* (T.T.P: Poyek Pembinaan Badan Pengadilan Agama, 1985
- Drs. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hamid, Tahir And. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Jakarta: Sinar Garafindo. 2005.
- Harahap, Yahya, M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pearadilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Harahap, Yahya. M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.
- Mana, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Jaarta: PT Citra Aditiya Bakri, 2000.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, *Mimber Hukum*, No. 2 Tahun, 1991 (Jakarta: AL-Hikmah, 1991

Poerwadarminta, W.J.S. *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1984.

Rasyid, A. Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rasyid, Chatib Dan Syaifuddin. *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek Pengadilan Agama*, Yogyakarta: UII Press

Undang-Undang Nomor. 7. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor. 4. Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor. 50. Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor. 3. Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Wargito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1996.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Perss, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Riwayat Hidup



Syarifuddin , lahir di Sinjai tanggal 5 juni 1986 merupakan anak terahir dari enam bersaudara pasangan Bapak Cappe, dengan Ibu Hudang. Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari SD No.143 pada tahun 1994, lalu kemudian melanjutkan kembali pada jenjang sekolah menengah pertama di pesantren darul ISTIQAM PUCE'E pada tahun 2000, hingga akhirnya dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah di sekolah yang sama yaitu DARUL ISTIQAMA PUCE'E, pada tahun 2007 saya melanjutkan pada jenjang strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Peradilan Agama, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada beberapa organisasi ekstra yaitu PMII, FPPI dan BERANDAL MALAM. Dan Al-hamdulillah pada tanggal 29-12-2011 saya mendapat gelar sarjana S.Hi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R